

**KAJIAN POTENSI IMPLEMENTASI SKEMA KERJA SAMA
PEMERINTAH-SWASTA (KPS) UNTUK PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI PROVINSI NTT**

TESIS

Oleh:

Marianus Talo Mau
NPM. 2016831030

Pembimbing:

Prof. Dr. Ing-habil. Andreas Wibowo

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJA SAMA**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

**DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
DESEMBER 2018**



HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN POTENSI IMPLEMENTASI SKEMA KERJA SAMA
PEMERINTAH-SWASTA (KPS) UNTUK PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI PROVINSI NTT**

Oleh:

**Marianus Talo Mau
NPM. 2016831030**



Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada Hari/Tanggal:

Sabtu, 15 Desember 2018

Pembimbing:

Prof. Dr. Ing-habil. Andreas Wibowo

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJA SAMA**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

**DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
DESEMBER 2018**



LEMBAR PENGUJI

SIDANG UJIAN TESIS

Hari/Tanggal: Sabtu, 15 Desember 2018

Oleh:

**Marianus Talo Mau
NPM. 2016831030**



PERSETUJUAN TESIS

1. **Prof. Dr. Ing-habil. Andreas Wibowo**
Pembimbing/Penguji
2. **Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc**
Penguji
3. **Muhammad Nizar, SE., MT**
Penguji

.....

.....

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJA SAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
DESEMBER 2018**



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Marianus Talo Mau
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016831030
Program Studi : Manajemen Proyek Konstruksi
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan



Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**“KAJIAN POTENSI IMPLEMENTASI SKEMA KERJA SAMA
PEMERINTAH SWASTA (KPS) UNTUK PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI PROVINSI NTT”**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau nonformal dari pihak dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik saya yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 15 Desember 2018


Marianus Talo Mau



KAJIAN POTENSI IMPLEMENTASI SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA (KPS) UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI NTT

Marianus Talo Mau (NPM: 2016831030)
Pembimbing: Prof. Dr. Ing-habil. Andreas Wibowo
Program Magister Teknik Sipil
Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi
Bandung
Desember 2018

ABSTRAK

Setiap pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur yang handal dan memadai. Namun demikian, upaya untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan seringkali terkendala dengan keterbatasan keuangan pemerintah. Mengandalkan secara eksklusif pada sektor publik (i.e., instansi pemerintah) untuk membiayai kebutuhan infrastruktur akan menyebabkan kesenjangan besar yang terjadi antara kebutuhan dan pemenuhan makin melebar. Masalah ini menjadi lebih mengemuka jika dikaitkan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sumber-sumber alternatif pendanaan selain dari kontribusi sektor publik sangat dibutuhkan, termasuk partisipasi sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS). Terlepas dari fakta telah banyak penelitian dilakukan dalam ranah KPS, hanya sedikit, atau bahkan tidak ada, yang didedikasikan untuk mengkaji potensi sektor publik khususnya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan skema KPS. Tesis ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dengan menggunakan Nusa Tenggara Timur sebagai studi kasus. Tesis ini mengkaji tingkat kesiapan dan kendala dari perspektif publik terhadap faktor-faktor yang diidentifikasi, merekomendasikan sektor infrastruktur potensial untuk KPS, dan menentukan model KPS yang dapat digunakan. Berdasarkan indeks kepentingan relatif yang diperoleh dari survei kuesioner kepada responden yang bekerja pada lembaga pemerintah terkait KPS, tesis ini memperlihatkan adanya tingkat kesiapan yang tinggi terutama dalam aspek komitmen dan koordinasi kelembagaan, yang mendukung keberhasilan pelaksanaan KPS. Di sisi lain, ada beberapa kendala untuk implementasi KPS antara lain kemampuan keuangan daerah terbatas dan kemampuan masyarakat untuk membayar tarif kurang mendukung. Tesis ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur air minum, menjadi sektor yang memiliki potensi besar untuk di-KPS-kan. Model-model KPS yang dapat digunakan adalah model Bangun dan serah, Bangun-kelola-serah, Bangun-serah-kelola, dan Renovasi-kelola-serah, dengan skema pengembalian melalui tarif atau pembayaran ketersediaan layanan. Tesis ini mendiskusikan temuan yang diperoleh dan ditutup dengan keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan bahan bagi penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Kerja sama pemerintah-swasta, Penyediaan infrastruktur, Tingkat kesiapan, Sektor publik, Indeks kepentingan relatif, Nusa Tenggara Timur.

THE ASSESSMENT OF POTENTIAL OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) SCHEME FOR INFRASTRUCTURE PROVISION IN NTT PROVINCE

Marianus Talo Mau (NPM: 2016831030)
Supervisor: Prof. Dr. Ing-habil. Andreas Wibowo
Master Program in Civil Engineering with
Concentration in Construction Project Management
Bandung
December 2018

ABSTRACT

Every government in both national and local level is responsible for providing reliable and adequate infrastructure. However, efforts to provide necessary infrastructure provision are often constrained by public fiscal austerity. Relying exclusively on the public sector i.e. government institutions to finance infrastructure need would cause the large gap between need and coverage to further increase. This issue becomes more prevalent when it comes to local government settings. Therefore, alternative sources other than public-sector contributions are needed, including those from the participation of the private sector under the scheme of public-private partnerships (PPPs). Despite the fact that there has been abundant research in the areas of PPPs, only a few, if not none, were dedicated to evaluating the readiness of local-specific public sector to implement this scheme. This thesis aims at addressing this paucity by taking East Nusa Tenggara as a case study. It assesses the readiness level and constraints from the public-sector perspective against pre-identified factors, recommends prospective infrastructure sectors for PPP, and determines the suitable PPP models. A questionnaire survey towards government officials working for PPP relevant public institutions was conducted. Based on the relative importance index, this thesis demonstrates relatively high readiness levels, especially in the aspect of institutional commitment and coordination, which are essential to support successful PPP implementation. On the other hand, there are some obstacles to PPP implementation, including the limited fiscal capacity and low ability to pay tariffs. It also shows that transportation infrastructure, electricity infrastructure, tourism infrastructure, and drinking water infrastructure, are among the sectors that have a great potential for PPP projects. The PPP models that can be used are Build-Transfer, Build-Operate-Transfer, Build-Transfer-Operate, and Rehabilitate-Operate-Transfer under user-pay or availability payment regime. This thesis discusses the findings and concludes with limitations that can pave the way for future research.

Keywords: *Public-private partnership, Infrastructure provision, Readiness level, Public sector, Relative importance index, East Nusa Tenggara*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Yang Maha Murah dan Maha Baik karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Kajian Potensi Implementasi Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur di Provinsi NTT”**. Tesis ini disusun sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana, Magister Teknik Sipil, Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penyelesaian tesis ini dapat terwujud karena dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ing-habil. Andreas Wibowo, selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi.
2. Bapak Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. dan Bapak Muhammad Nizar, SE., MT, selaku penguji yang memberikan masukan dan saran yang membangun mulai dari seminar proposal sampai dengan sidang tesis ini.
3. Seluruh dosen Program Pascasarjana Teknik Sipil khususnya dosen Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Manajemen Proyek Konstruksi.
4. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah memfasilitasi kami untuk belajar.
5. Pimpinan dan staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengikuti Pendidikan ini.
6. Bupati Kupang yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti pendidikan ini.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang, seluruh atasan dan rekan-rekan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang yang telah mendukung penulis untuk mengikuti pendidikan ini.

8. Bapak Yosep Tai dan Mama Veronika Paru serta adik-adik yang selalu mendukung penulis untuk mengikuti pendidikan ini.
9. Istri tercinta Anastasia Dau dan anak-anak tersayang Angel, Shandy, Dodo dan Erma atas cinta, doa, dan pengorbanan serta menjadi motivasi dalam penyelesaian pendidikan ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan karyasiswa Magister Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan Bandung angkatan 2016 dan 2017 atas kerja sama dan dukungannya dalam proses penyelesaian pendidikan ini.
11. Semua pihak yang memberikan bantuan selama proses pendidikan terutama proses penyelesaian tesis ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya.

Bandung, Desember 2018

Marianus Talo Mau

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Konsep Dasar Investasi Infrastruktur	9
2.1.1. Pengertian Infrastruktur	9
2.1.2. Karakteristik Investasi Infrastruktur	10
2.1.3. Pembiayaan Infrastruktur	12
2.2. Konsep Dasar Kerja Sama Pemerintah-Swasta	12
2.2.1. Pengertian Kerja Sama Pemerintah-Swasta	12
2.2.2. Perkembangan KPS	14
2.2.3. Dukungan Pemerintah	15
2.3. Identifikasi dan Seleksi Proyek KPS	17
2.4. Model-Model Kontrak KPS	18
2.5. Pengelolaan Risiko dalam Pelaksanaan KPS	22

2.6. Peluang Daerah Untuk Melaksanakan KPS	23
2.7. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Tahapan Penelitian	31
3.2. Subjek Penelitian	35
3.3. Pengumpulan Data	35
3.3.1. Pengumpulan Data Sekunder	35
3.3.2. Pengumpulan Data Primer	36
3.4. Variabel Penelitian	36
3.4.1. Variabel Kesiapan dan Kendala	36
3.4.2. Variabel Infrastruktur Yang Berpotensi	49
3.5. Sistem Penilaian	50
3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas	51
3.6.1. Uji Validitas	52
3.6.2. Uji Reliabilitas	52
3.7. Pengolahan dan Analisis Data	53
3.7.1. Statistik Deskriptif	54
3.7.2. Integrasi Kesiapan dan Jenis Infrastruktur Yang Berpotensi	55
3.7.3. Analisis Data Hasil Wawancara	57
3.7.4. Analisis Pemilihan Model Skema KPS	57
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas	59
4.1.1. Uji Validitas	59
4.1.2. Uji Reliabilitas	62
4.2. Pengumpulan Data Primer	63
4.3. Deskripsi Data Umum Responden	64
4.4. Pengolahan dan Analisis Data	65
4.4.1. Statistik Deskriptif	65
4.4.2. Uji Komparasi Responden	69
4.4.3. Integrasi Faktor Kesiapan dan Jenis Infrastruktur Yang Berpotensi	72

4.4.4. Pemilihan Model Skema KPS	76
4.5. Pembahasan	83
4.5.1. Kesiapan Pihak Publik untuk Implementasi Skema KPS	83
4.5.2. Faktor-faktor Kendala Implementasi Skema KPS	90
4.5.3. Jenis-jenis Infrastruktur Yang Berpotensi	94
4.5.4. Model KPS Yang Dapat Digunakan	100
4.6. Diskusi	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Faktor-faktor dan Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Skema KPS, Menurut Sabry (2015) ..	25
Tabel 2.2 Variabel dan Sub Variabel Potensi Penerapan Skema KPS, Menurut Kurniawan et al. (2009)	28
Tabel 2.3 Variabel dan Kriteria Uji Model Kerjasama Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Dalam Pengelolaan TPA Regional, Menurut Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Kementerian PUPR (2011)	28
Tabel 3.1 Variabel Kesiapan dan Kendala Implementasi Skema KPS untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah	37
Tabel 3.2 Variabel Infrastruktur Yang Berpotensi untuk Disediakan Melalui Skema KPS	49
Tabel 3.3 Kategori Respon Skala Likert	51
Tabel 3.4 Klasifikasi Kategori Indikator	55
Tabel 3.5 Format Matriks Dukungan Kesiapan Terhadap Jenis Infrastruktur Yang Berpotensi	57
Tabel 3.6 Format Matriks Pemilihan Model Skema KPS	58
Tabel 4.1 Data Responden Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian	59
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner Bagian Kesiapan Implementasi KPS	60
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kuesioner Bagian Jenis Infrastruktur Yang Berpotensi	61
Tabel 4.4 Hasil Analisis <i>RII</i> Faktor Kesiapan Implementasi Skema KPS	66
Tabel 4.5 Hasil Analisis <i>RII</i> Jenis Infrastruktur Untuk Disediakan Melalui Skema KPS.....	67
Tabel 4.6 Data Pakar Yang Terlibat Sebagai Narasumber Penilaian Relevansi	74

Tabel 4.7	Penilaian Relevansi Jenis Infrastruktur Yang berpotensi Terhadap Faktor Kesiapan.....	74
Tabel 4.8	Prioritas Usulan Jenis Infrastruktur Yang berpotensi.....	75
Tabel 4.9	Matriks Pemilihan Model Skema KPS.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran1 Kuesioner	117
Lampiran 2 Form Penilaian Pakar	127
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas (Softwere SPSS Versi 22).....	134
Lampiran 4 Matriks Uji Reliabilitas Instrumen dengan Cronbach Alpha	138
Lampiran 5 Data Jawaban Responden dengan Nilai dan Peringkat <i>RII</i>	139
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas	143
Lampiran 7 Hasil Uji <i>Mann-Whitney</i>	146
Lampiran 8 Matriks Integrasi Kesiapan Pihak Publik dan Jenis Infrastruktur yang berpotensi	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, namun hal ini bukan berarti bahwa pembangunan infrastruktur merupakan wewenang mutlak pemerintah. Masyarakat harus dilibatkan dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaannya. Untuk itulah, salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah sangat menyadari peran penting infrastruktur tersebut. Karenanya, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015–2019, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas nasional untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan meningkatkan produktivitas rakyat. Untuk sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (2015) menegaskan dukungan ketersediaan infrastruktur adalah bersifat multidimensi: infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan konektivitas (Wibowo, 2016). Saat pembukaan Forum Keuangan Infrastruktur di Jakarta tanggal 25 Juli 2017, Menteri keuangan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa:

“Indonesia harus mengejar ketinggalan untuk membangun fasilitas infrastruktur karena ekonomi saat ini terus bergerak maju. Namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan dengan cepat karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, tapi

kita bisa memanfaatkan skema pendanaan dengan menarik investasi swasta. Oleh karena itu, partisipasi swasta sangat penting untuk mengatasi tantangan terbatasnya anggaran pemerintah dalam membangun fasilitas infrastruktur”.

Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014: (1) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan: a. pemerintah daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dimungkinkan sepanjang menyangkut pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki karakteristik sebagaimana yang dikemukakan oleh Oliver Holtman dalam Asikin (2013) sebagai berikut: (1) umumnya tidak bisa memilih pelanggan; (2) peran dibatasi oleh undang-undang; (3) politik melembagakan konflik; (4) akuntabilitas yang kompleks; (5) sangat terbuka untuk keamanan; (6) tindakan harus dibenarkan; (7) tujuan keluaran sulit diukur.

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung merencanakan pengerjaan berbagai proyek tahun 2016 dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) senilai lebih kurang Rp60 triliun untuk mewujudkan program Bandung Juara; di sisi lain kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2016 hanya mencapai kisaran Rp6

triliun (Ismowati, 2016). Hal ini menunjukkan percepatan pembangunan Kota Bandung bisa lebih dari sepuluh kali lebih cepat dibanding hanya mengandalkan kemampuan APBD. Pengalaman Pemerintah Kota Bandung ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain untuk mencari terobosan dan inovasi pembiayaan infrastruktur; salah satunya melalui skema pembiayaan swasta dengan mekanisme KPS sesuai potensi daerah yang dimiliki.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia saat ini masih menjadi daerah tertinggal dalam pembangunan fasilitas infrastruktur. Hal ini disebabkan terbatasnya keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga proses pembangunan infrastruktur sangat lambat. Diketahui bahwa kemampuan APBD Provinsi NTT tahun 2018 hanya sebesar Rp4.968.984.219.000,00 (Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 tahun 2017). Berdasarkan rencana kerja Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTT tahun 2019–2023, untuk jalan provinsi saja yang masih menyisihkan 37% atau 980,5 Km kondisi belum mantap dibutuhkan investasi Rp5,5 triliun untuk mencapai kondisi mantap 100% pada akhir tahun ke-5, sedangkan kemampuan APBD hanya mampu mengalokasikan kurang lebih Rp200 milyar saja setiap tahun. Secara nasional, investasi infrastruktur yang dibutuhkan selama 2015–2019 adalah Rp5.159 triliun dan dari jumlah tersebut lebih kurang 50% melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) (Wibowo, 2016). Kondisi kesenjangan ini merupakan tantangan yang cukup serius dalam menghadapi tingginya pembiayaan penyediaan infrastruktur.

Untuk mengatasi kesenjangan yang cukup besar tersebut, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk NTT perlu mencari alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menerapkan skema KPS; yaitu kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas-fasilitas komunitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya.

KPS bercirikan adanya pembagian investasi, risiko, pertanggungjawaban, dan penghargaan antara pemerintah dengan sektor swasta yang menjadi mitranya (Khitam, 2012). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 tahun 2015 dijelaskan bahwa badan usaha yang dimaksud dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Dengan demikian, jika ditinjau dari keterlibatan badan usaha, KPS dapat dikatakan bagian dari KPBU di mana badan usaha yang terlibat dalam KPS adalah badan usaha swasta.

Namun demikian, isu kritisnya adalah apakah skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui KPS ini dapat diterapkan di NTT? Hal ini menyangkut potensi yang dimiliki untuk memungkinkan KPS berjalan dengan baik. Kamus besar bahasa Indonesia memberi arti potensi sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Untuk konteks KPS, potensi tersebut menyangkut kesiapan pihak publik dan jenis infrastruktur yang dapat disediakan. Sejauh ini kajian tentang pelaksanaan

KPS di daerah masih sangat terbatas, apalagi untuk NTT. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan kajian komprehensif yang dapat menggambarkan peluang untuk mengimplementasikan KPS di NTT.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ranah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa jauh KPS dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT. Permasalahan yang terkait dengan potensi dalam penelitian ini selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesiapan sektor publik dalam mengimplementasikan KPS untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT?
- b. Faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi KPS untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT?
- c. Jenis infrastruktur apa saja di Provinsi NTT yang berpotensi dapat disediakan melalui skema KPS?
- d. Model KPS apa yang dapat digunakan dalam penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara terbatas yaitu melalui pendapat atau pandangan dari pihak pemerintah saja. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah yang akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) merupakan pihak pertama yang dinilai paling mengetahui tentang

kesiapan daerah untuk implementasi KPS di daerah, potensi daerah dan upaya mengelola kendala-kendala yang ada menjadi potensi.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menentukan kesiapan sektor publik dalam mengimplementasikan KPS untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT.
- b. Untuk menemukenali faktor kendala implementasi KPS untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT.
- c. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis infrastruktur di Provinsi NTT yang berpotensi disediakan melalui skema KPS.
- d. Untuk menentukan model KPS yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik proyek dan karakteristik daerah provinsi NTT.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberi rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPS.
- b. Memberi informasi bagi para calon investor untuk kepentingan pengambilan keputusan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT.
- c. Memperkaya *body of literature* mengenai KPS dalam penyediaan infrastruktur daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN; berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA; berisi tentang kajian literatur yang sesuai dengan topik yang dikaji yakni mengenai konsep dasar infrastruktur (i.e., pengertian infrastruktur, karakteristik infrastruktur, investasi infrastruktur, pembiayaan infrastruktur), konsep dasar KPS (i.e., pengertian KPS, perkembangan KPS, dukungan pemerintah, skema pembiayaan proyek KPS), identifikasi dan seleksi proyek KPS, model-model kontrak KPS, manajemen risiko dalam pelaksanaan KPS (i.e., jenis-jenis risiko, pengelolaan risiko), peluang daerah untuk melaksanakan KPS, dan penelitian terdahulu yang relevan. Studi pustaka dilakukan melalui buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung proses penelitian ini.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN; berisi tentang penjelasan metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari tahapan penelitian, subjek penelitian yang menunjukkan responden dalam penelitian ini, pengumpulan data yang diperlukan berupa data primer maupun sekunder, menyusun variabel penelitian yang nantinya akan digunakan dalam kuesioner yang akan disebar, dan metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN; berisi tentang penjelasan mengenai proses analisis data terhadap data-data yang diperoleh,

menggunakan metode analisis data yang diuraikan dalam Bab III. Dari hasil analisis yang diperoleh, dilakukan pembahasan yang dapat memberi suatu rumusan kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN; berisi tentang poin-poin utama dari hasil penelitian dan saran bagi para penerima manfaat dari hasil penelitian ini.